

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : KHAIRUL FAHRI
NPM : 1405170463
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **KHAIRUL FAHRI**
N P M : **1405170463**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : **KHAIRUL FAHRI**
N.P.M : **1405170463**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KHAIRUL FAHRI
N.P.M : 1405170463
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH KOTA
MEDAN

| Tanggal | Deskripsi Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|------------|---|-------|------------|
| 09/05-2018 | - Hasil penelitian diuji coba dengan tujuan dan rumus masalah | / | |
| | - variabel penelitian diuji coba dengan variabel penelitian | / | |
| | - Teknik penulisan ayat ke atas | / | |
| 13/05-2018 | - Pembahasan program lama dan baru dengan angka dan hasil uji hipotesis di jelaskan | / | |
| | - lampiran dilengkapi baik dan banyak yg lain | / | |
| 20/05-2018 | - Sami formulir dengan komputer yg diupdate | / | |
| | - Daftar isi dirumuskan dengan baik | / | |
| 22/05-2018 | - Perbaikan lampiran dan perijinan | / | |
| | - Daftar pustaka | / | |
| | | | |
| | | | |

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Khairul Fahri
NPM : 1405170463
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis (Akuntansi/ Perpajakan/ Manajemen/ IESP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/ Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2018

Pembuat Pernyataan




Khairul Fahri

NB :

- a. Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada Saat Pengajuan Judul
- b. Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Khairul Fahri, NPM.1405170463. PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UMSU. Skripsi. 2018

Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja penyebab devisa pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah kota Medan, untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas keuangan daerah kota Medan dalam penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti mendapatkan data berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kota Medan dari tahun 2012 sampai 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X_1), secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Belanja langsung (Y). Diterima kesimpulannya: ada pengaruh Pajak daerah terhadap Belanja langsung dalam meningkatkan retribusi pajak pada Pemerintah Kota Medan. Retribusi Daerah (X_2), secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Belanja langsung. Diterima kesimpulannya: ada pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung dalam meningkatkan pendapatan pajak pada Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan hasil uji F bahwa Pajak daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan. nilai R Square 0,981 atau 98,1%, interpretasinya adalah kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan sebesar 98,1% dan sisanya 1,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Langsung*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tepat waktu. Skripsi ini menjadi syarat guna memperoleh gelar sarjana akutansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, adapun judul skripsi ini yaitu : **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kota Medan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dijumpai baik dari segi penyusunan materi yang belum mencapai kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang diberikan, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda saya **Mahyudin** dan Ibunda **Gusmiati** serta Kakak dan Abang saya **Deni, Sopian, Mimi, Dani, Rina, Mariza, Tiwi, Akbar**, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta Doa

yang tiada henti diberikan dan Semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E, M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE, Msi** selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
5. Bapak **Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si** selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
6. Ibu **Fitiani Saragih, S.E, M.Si** selaku Ketua Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi SE M, Ak** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk menuntun serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengerjakan skrpsi ini.
9. Seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada dinas keuangan daerah kota medan yang telah banyak membantu penulis dalam menyediakan data yang telah dibutuhkan oleh penulis dalam mengerjakan laporan magang ini.

11. Kepada Teman-teman seperjuangan di PK IMM Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Periode amaliyah 2016-2017, Khoirul ahyar Siregar, M.Andri Hermawan, Ashabihil ahyar Pribadi, Nida zuhrah, M. Fadlillah, M.Zein Fadly, Dzulfadly M Sianipar, Esty Iswahyuni, Ica Citra A, Mhd.Riswan habibi, Rani Sri Rahayu, Billy Siallagan, Putri puspita Sari, M.Gunawan, Afdhal Usnul maafi, Wike arinty, Suci Chasara Nasution, Ricky Darmawan dll Terimah kasih atas dukungan kalian semua.
12. Seluruh Teman-teman seperjuangan di kelas Akuntansi F Pagi stambuk 2014.
13. Teman-teman seperjuangan di konsentrasi perpajakan yang selalu mendukung dalam penyelesaian laporan magang ini.
14. Kepada seluruh Immawan dan immawati PK IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
15. Kepada seluruh Senior dan Alumni(FOKAL) PK IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan magang ini. Penulis mengharapkan, semoga laporan magang ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan bagi penulis khususnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Aminn ya Rabbal'Alamin

Billahi fi sabililhaq,fastabiqulhairat

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

KHAIRUL FAHRI

NPM.1405170463

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Magang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat penelitian..... | 7 |
| BAB II Landasan Teori | 8 |
| A. Uraian Teori | 8 |
| 1. Pajak Daerah..... | 8 |
| a. Pengertian pajak daerah..... | 8 |
| b. Jenis pajak Daerah..... | 10 |
| 2. Retribusi Daerah | 12 |
| a. Definisi retribusi daerah | 12 |
| b. Subjek retribusi daerah..... | 13 |
| c. Objek retribusi daerah | 13 |
| 3. Belanja Daerah | 14 |
| a. Belanja langsung..... | 15 |
| B. Penelitian Terdahulu | 17 |
| C. Kerangka Konseptual | 19 |
| D. Hipotesis | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| A. Pendekatan Penelitian | 22 |
| B. Definisi Operasional Variabel | 22 |
| C. Tempat dan Wakt Penelitian | 24 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 25 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| F. Teknik Analisis data | 26 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |

| | |
|---|----|
| A. Gambaran umum instansi..... | 33 |
| 1. Geografi dan Demografi..... | 33 |
| 2. Potensi Pengembangan wilayah | 34 |
| 3. Demografis Kota Medan | 36 |
| 4. Kesejahteraan masyarakat | 37 |
| B. Hasil Penelitian..... | 42 |
| 1. Deskripsi Data | 43 |
| 2. Analisis Data | 44 |
| a. Uji asumsi klasik | 44 |
| 1) Uji normalitas..... | 44 |
| 2) Uji multikolinearitas | 45 |
| 3) Uji autokorelasi | 46 |
| 4) Uji heteroskedastisitas | 47 |
| 3. Analisis Regresi Berganda | 48 |
| 4. Uji Hipotesis | 50 |
| a. Uji t..... | 50 |
| b. Uji f | 51 |
| 5. Koefisien dertiminasi | 52 |
| C. Pembahasan | 53 |
| 1. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja langsung | 53 |
| 2. Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja langsung | 55 |
| 3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung..... | 56 |

BAB V PEMBAHASAN 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar II.1 : Kerangka Konseptual..... | 20 |
| Gambar IV.1 : Uji Normalitas..... | 44 |
| Gambar IV.2 : Uji Normalitas..... | 45 |
| Gambar IV.3 : Heterokedastisitas..... | 48 |
| Gambar IV.4 : kriteria pengujian hipotesis..... | 52 |

Daftar Tabel

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | : Kondisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Belanja langsung..... | 4 |
| Tabel III.1 | : Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi..... | 29 |
| Tabel IV.1 | : Data pajak, retribusi, dan belanja langsung pemerintah kota medan..... | 43 |
| Tabel IV.2 | : Uji Multikolinearitas..... | 46 |
| Tabel IV.3 | : Uji AutoKorelasi..... | 47 |
| Tabel IV.4 | : Regresi Linier Berganda..... | 49 |
| Tabel IV.5 | : Uji t..... | 50 |
| Tabel IV.6 | : Uji f..... | 51 |
| Tabel IV.7 | : Koefisien Determinasi..... | 52 |
| Tabel IV.8 | : pedoman koefisien korelasi..... | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Pemerintah Daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 selanjutnya kemudian direvisi menjadi UU No. 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan ditransfer dana perimbangan kepada daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian : 2006). Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Kinerja dan kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim : 2001).

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Adanya desentralisasi merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Dalam perspektif ini,

pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber – sumber keuangan lokal khususnya melalui Pendapatan Asli daerah (Sidik : 2002). Tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi. Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diharapkan, pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing – masing daerah. Fenomena utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam membiayai belanja langsung. Kontribusi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kota medan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011: 12-15), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar kepada daerah. Yang dapat membantu memberikan efek terhadap pengalokasian belanja daerah terutama untuk belanja langsung oleh pemerintah kota medan, sehingga bagian dari belanja daerah tersebut yaitu belanja langsung yang telah direncanakan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia dan juga kebutuhan yang diperlukan. Pemerintah daerah Kota Medan sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan tingginya penerimaan PAD akan dapat membiayai belanja langsung daerah secara mandiri.

Berikut merupakan laporan realisasi anggaran dari pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja langsung pemerintah Kota Medan dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.1
Kondisi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Belanja Langsung Kota Medan Tahun 2012 – 2016 (Dalam satuan
Rupiah)

| TAHUN | PAJAK DAN RETRIBUSI | BELANJA LANGSUNG | LEBIH / (KURANG) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2012 | 1.020.513.897.751,27 | 1.494.850.608.278,49 | (474.336.710.527,22) |
| 2013 | 1.069.806.514.138,51 | 1.602.498.127.952,33 | (532.691.613.813,82) |
| 2014 | 1.133.734.569.288,53 | 2.021.590.110.051,46 | (887.885.540.762,93) |
| 2015 | 1.196.176.287.729,64 | 2.412.430.321.399,63 | (1.216.254.033.669,99) |
| 2016 | 1.241.223.162.993,32 | 2.550.662.984.955,65 | (1.309.439.821.962,33) |

Sumber : Keuangan Daerah Kota Medan

Berdasarkan data di atas dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan begitu pula dengan belanja langsung yang terus mengalami peningkatan, akan tetapi pajak dan retribusi daerah tersebut tidak bisa menanggulangi dari besarnya belanja langsung pemerintah kota medan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam

Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Sumber – sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Di mana yang membedakan kedua kelompok belanja tersebut, yaitu apakah belanja terkait secara tidak langsung atau langsung, terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Belanja Langsung sering dikatakan juga sebagai Belanja Publik, karena merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan fenomena dan uraian teori yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi daerah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kota Medan. “**

B. Identifikasi masalah

1. Adanya kenaikan belanja langsung setiap tahunnya.
2. Adanya kenaikan pajak daerah setiap tahunnya.
3. Adanya kenaikan retribusi daerah setiap tahunnya

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
3. Apakah Belanja Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah terhadap belanja langsung
- b. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi daerah terhadap belanja langsung

- c. Untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap belanja langsung

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat di ambil bagi penulis dari penulisan ilmiah ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemko Medan.

- b. Bagi Pemerintah Kota Medan

Penulisan ilmiah ini diharapkan menjadi acuan untuk Pemko Medan untuk memaksimalkan potensi yang ada di kota medan.

- c. Bagi Pihak Lain

Penulisan ilmiah ini diharapkan menjadi suatu bahan pustaka, referensi, serta dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa/i yang mempunyai minat untuk meneliti kondisi keuangan pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORI

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011: 1) "Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yaitu "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2), "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan

pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Sesuai dengan yang telah di jelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan. Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis,(2011) yaitu;

- 1) Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.
- 2) Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).
- 3) Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak.
- 4) Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat.
- 5) Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- 6) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kpatuhan membayar pajak.

Kemudian menurut (Davey, 1988), Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah yaitu:

- a) Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

- b) Pemerataan (keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya.
- c) Kemampuan / kelayakan administrasi berbagai jenis pajak di daerah sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya.
- d) Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku di suatu daerah.
- e) Diskorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

b. Jenis Pajak Daerah

Unsur –unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.

- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003 pasal 2 adalah Jenis Pajak Daerah Kota Medan terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terrealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka

akan memberikan idikasi yang baik bagi keuanga daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Retribusi Daerah

a. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut pendapat para ahli, contohnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena telah memakai jasa yang telah disediakan

pemerintah daerah. Sehingga masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu (Mardiasmo, 2009:17):

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

c. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari (Mardiasmo, 2009:16) :

- 1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan Tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Belanja Daerah

Program dan kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah berimplikasi adanya pengeluaran atau belanja. Belanja daerah menurut undang-undang No. 22 tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang belanja daerah di klasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.

- a. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
 - 1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan
Klasifikasi belanja menurut fungsi di gunakan untuk Tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari; pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial.

- c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:(1) belanja pegawai, (2) belanja barang,(3) belanja modal,(4) bunga,(5) Subsidi,(6) Hibah,(7) bantuan sosial,(8) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan (9) belanja tidak terduga.

Klasifikasi belanja berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006 pasal 24 ayat (2) yakni menurut jenis belanja terbagi dua yakni : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

a. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang mempengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Pemerintah diminta lebih fokus meningkatkan belanja langsung (*direct spending*), baik melalui peningkatan daya beli konsumen maupun pembangunan infrastruktur. Belanja langsung diyakini memiliki *multiplier effect* lebih dahsyat dalam penciptaan lapangan kerja dibanding intensif fiskal yang hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja (Sari, 2010).

Belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun diluar daerah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Seperti, pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, dan ongkos perjalanan dinas, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas (12) bulan / pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Belanja modal dikategorikan dalam lima kategori yakni :

- a) Belanja modal tanah
- b) Belanja modal peralatan dan mesin
- c) Belanja modal gedung dan bangunan
- d) Belanja modal jaringan
- e) Belanja modal buku perpustakaan dan hewan

B. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Perbedaan |
|----|--------------------------------|-------|---|--|
| 1 | Yulius Agus Linggau Pratomo | 2016 | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul | Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Agus Linggau Pratomo menggunakan variabel x : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Dan Variabel Y : Belanja Daerah, Sedangkan peneliti menggunakan variable X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Variabel Y : Belanja langsung |
| 2 | Bagus bowo laksono | 2014 | Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah | Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Bowo Laksono membahas pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK |

| | | | | |
|---|--|------|--|---|
| | | | | <p>Terhadap Belanja Langsung sedangkan peneliti membahas pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung</p> |
| 3 | <p>Sandry Yossi, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang</p> | 2014 | <p>Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (studi pada kabupaten bolaang mongondo 2004-2013)</p> | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Sandry Yossi, J. B. Kalangi dan krest D. Tolosang merupakan Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah sedangkan peneliti membahas pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung serta</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | dengan jangka waktu yang berbeda dengan peneliti |
|--|--|--|--|--|

C. Kerangka Konseptual

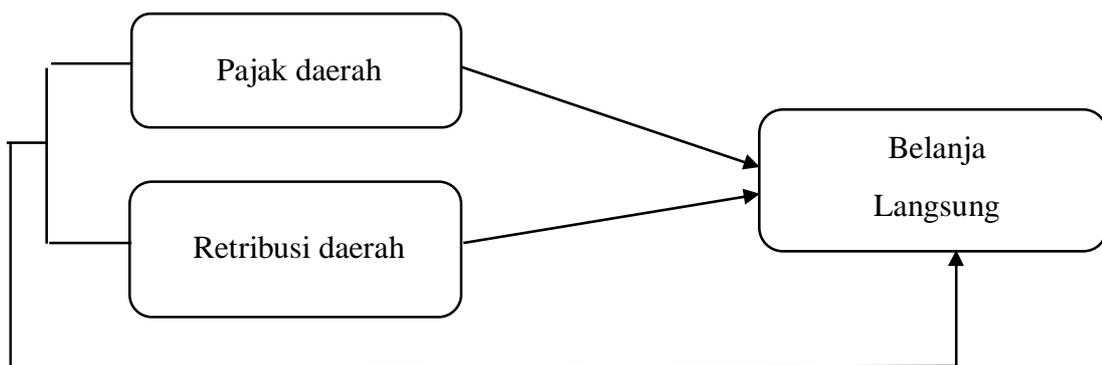
kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah kota Medan. Dimana variabel analisisnya, variabel independen yaitu pajak daerah adalah x^1 dan Retribusi daerah adalah x^2 , Sedangkan belanja langsung sebagai variabel dependen (Y).

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Dari komponen PAD tersebut pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dan belanja langsung. Semakin besar pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula PAD yang diterima. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun belanja Modal. Sedangkan dari sektor Retribusi daerah, jika retribusi daerah meningkat, maka PAD akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja langsung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada keuangan daerahnya. Ini berarti bahwa keuangan daerah kota Medan sebagai daerah otonomi harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dalam upaya mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dari dominasi dana trnsfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1

Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung

Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan belanja langsung.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara yang paling memungkinkan dan masih harus dibuktikan melalui penelitian. Dugaan jawaban ini bermanfaat bagi penelitian agar proses penelitian lebih terarah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung”.

H¹ : Pajak Daerah mempengaruhi belanja langsung

H² : Retribusi Daerah mempengaruhi belanja langsung

H³ : Pajak daerah dan Retribusi daerah bersama - sama berpengaruh terhadap belanja langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011: 1) "Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yaitu "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003 pasal 2 adalah Jenis Pajak Daerah Kota Medan terdiri atas :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Air Tanah
- h) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- i) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang - Undang no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Adapun objek dari Retribusi daerah yakni :

- a) Retribusi Jasa Umum

- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

3. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, Mardiasmo (2009). Adapun belanja langsung yang dimaksud terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa
- c) Belanja Modal

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Dinas Keuangan Daerah Kota Medan yang bertempat Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

| NO | KETERANGAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Riset Pendahuluan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Martono (2010, hal. 66) Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Berdasarkan teori dari Martono maka peneliti mengambil populasi di wilayah kota medan.

2. Sampel

Menurut Martono (2010,hal. 66) Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Metode

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti mendapatkan data berupa laporan keuangan pemerintah kota medan dari tahun 2012 sampai 2016. Dimana data tersebut di dapat dari kantor keuangan daerah kota medan.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumentasi yaitu untuk mempelajari data-data yang ada dalam kantor keuangan daerah Kota medan dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu data-data laporan keuangan yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab masalah-masalah penelitian maka berdasarkan data-data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti maka pengujian dilakukan dengan menggunakan suatu pengujian statistik. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan statistik deskriptif, konsep ini digunakan untuk memudahkan pendeskripsian hasil penelitian, adapun analisis data yang digunakan dengan menghitung nilai *mean*, *median*, *maksimum* dan *minimum*.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat - syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat - syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

a. Uji normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik - titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov - Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov - Smirnov menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel bebas (independen) harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Santoso, 2000). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Santoso (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 3.1
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

| Hipotesis Nol (H_0) | Keputusan | Jika |
|---|---------------|-------------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | No Decision | $d_l \leq d \leq d_u$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | $4 - d_l < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | No Decision | $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi, positif negatif | Tidak ditolak | $d_u < d < 4 - d_u$ |

Sumber : Imam Ghozali, 2006

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

3. Analisis Regresi Linear berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1 dan X_2 = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

4 Pengujian Hipotesis (Uji t dan f)

a. Uji t

Untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan Uji t.

Dengan Kriteria:

- 1) Jika tabel Coefficient memiliki nilai signifikansi $>$ dari 0,05 dan nilai t hitung $<$ t tabel, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y .
- 2) Jika tabel Coefficient memiliki nilai signifikansi $<$ dari 0,05 dan t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh signifikan antar variabel x dan y

b. Uji f

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%).

Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $<$ 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi $>$ 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

5 Koefisien Determinasi

Identifikasi koefisien determinan ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika koefisien determinan (R^2) semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terkait (Y). hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika koefisien determinan (R^2) semakin kecil atau mendekati nol maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak cukup kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Hal ini dapat dilihat pada tabel **Model Summary**.

koefisien determinasi dapat dicari dengan mengkuadratkan nilai r, dengan rumus sebagai berikut :

$$D = r^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2008, hal 253)

Dimana : D = Koefisien Determinasi

r = Nilai Korelasi *Product Moment*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

Gambaran umum kondisi Kota Medan memuat perkembangan kondisi Kota Medan sampai saat ini, capaian hasil pembangunan kota sebelumnya dan tantangan pembangunan kota yang harus diatasi. Perkembangan kondisi Kota Medan menyangkut kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemahaman terhadap kondisi Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan kota Medan

1. Geografi dan Demografi

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km² atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.

Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kotametropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara internasional

kwala namu dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya.

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil disbanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumberdaya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan. Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbangnya dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan bagian selatan.

2. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kota Medan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat perekonomian daerah dan regional yang penting serta utama di Pulau Sumatera. Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan barang dan keuangan domestik, maupun regional/internasional dikawasan barat Indonesia dengan dukungan faktor-faktor dominan yang dimilikinya. Pembangunan dan pengembangan fisik Kota Medan diarahkan untuk kepentingan kerjasama

pembangunan kawasan industri dan perdagangan baru dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menciptakan daya tarik pusat kota dan mendorong pengembangan dunia usaha. Keinginan untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, perdagangan, keuangan dan industri berskala regional dan nasional didukung oleh beberapa faktor antara lain : (1) 60,8% industri perbankan memilih lokasi di Kota Medan; (2) 84,8% kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; (3) Usaha industri yang terus berkembang, dimana sampai saat ini telah mencapai 5.596 usaha, baik berskala usaha besar, sedang dan kecil; (4) ketersediaan kawasan-kawasan industri; (5) berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan lain-lain serta (6) struktur ekonomi kota yang terbentuk sampai saat ini yang cenderung semakin kuat secara fundamental. Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Mebidangro dan RTRW Kota Medan, potensi pengembangan wilayah Kota Medan yang utama adalah: (1) sebagai pusat kegiatan nasional, (2) sebagai kawasan strategis nasional, (3) sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara, (4) sebagai pusat jasa, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, dan (5) sebagai dinamisator serta lokomotif bagi pertumbuhan wilayah hinterlandnya sehingga direncanakan menjadi salah satu Kota Metropolitan baru di Indonesia.

Potensi pengembangan wilayah Kota Medan juga didukung oleh kedudukan strategis Kota Medan secara regional, nasional dan internasional, seperti Medan memiliki jarak tempuh yang relatif singkat dengan kota-kota/Negara-negara lain secara regional/internasional, yaitu : (1) Kuala Lumpur : 40 menit, (2) PulauPinang/Ipoh : 30 menit, (3) Singapore : 55 menit, (4) Pekan

Baru/ Padang : 45 menit, (5) Aceh : 40 menit dan (6) Jakarta :120 menit, dan lain-lain.

3. Demografis Kota Medan

Jumlah penduduk Kota Medan akhir tahun 2011 diperkirakan mencapai 2,1 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% per tahun, sehingga Kota Medan tercatat sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan dari tahun 2005 menunjukkan trend menurun atau perlambatan pertambahan penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk antara lain didorong oleh pelaksanaan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya norma keluarga kecil sejahtera, dan perubahan cara pandang penduduk Kota Medan yang tidak lagi menganggap “banyak anak banyak rezeki”. Kelompok keluarga muda cenderung memilih untuk memiliki anak yang semakin berkualitas.

Disamping itu penduduk Kota Medan memiliki ciri keragaman (*pluralitas*) baik dari agama, suku etnis, budaya dan adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter penduduk Kota Medan yang bersifat terbuka dan dinamis. Perkembangan kependudukan Kota Medan pada saat ini juga ditandai oleh proses transisi demografi, yaitu proses penurunan tingkat kesuburan sampai terciptanya jumlah penduduk yang stabil. Penurunan tingkat kelahiran antara lain disebabkan oleh perubahan pola fikir dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, perbaikan gizi dan status kesehatan juga mempengaruhi penurunan tingkat kematian. Pada akhir proses transisi demografi, tingkat

kelahiran dan kematian tidak banyak berubah sehingga jumlah penduduk cenderung tidak berubah, kecuali adanya migrasi.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Medan dipengaruhi kondisi perekonomian daerah termasuk faktor kualitas dan pemerataannya. Kondisi perekonomian Kota Medan sesuai dengan indikator pokok ekonomi makro dapat disajikan sebagaiberikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atas harga dasar konstan (2000) Kota Medan terus meningkat. Nilai PDRB meningkat dari Rp. 33,4 Trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 38,5 Trilyun pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 14,84 persen. Pertumbuhan PDRB Kota Medan pada tahun 2011 mencapai 7,69 persen dengan pertumbuhan tertinggi di sektor jasa sebesar 9,22 persen, sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 9,07 persen, dan sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,04 persen. Sementara, pertumbuhan paling rendah terjadi pada sektor penggalian. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan dipengaruhi oleh penambahan jumlah tenaga kerja dan investasi terutama di sektor tersier (jasa-jasa) dan sekunder (industri pengolahan). Pertumbuhan PDRB tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian kota selama periode 2005-2009 relatif baik didukung oleh struktur ekonomi yang sebagian besar dari sektor tersier (69,71 persen), sektor sekunder (27,40 persen) dan sektor primer (2,89 persen). Walaupun pertumbuhan PDRB (ADHK) Kota Medan selama periode Tahun 2005-2009 relatif cukup berarti, namun tantangan klasiknya adalah pertumbuhan

yang belum sepenuhnya berkualitas mendukung efisiensi perekonomian kota, disamping belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

b. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian kota yang kokoh akan menjadi motor penggerak perekonomian dan sekaligus penopang ketahanan ekonomi daerah. Struktur ekonomi Kota Medan didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 27,09 persen per tahun.

Sumbangan sektor transportasi dan telekomunikasi rata-rata sebesar 20,52 persen, sektor industri dan pengolahan sebesar 12,86 persen, serta sector keuangan dan jasa perusahaan sebesar 14,52 persen pertahun.

Ciri perekonomian Kota Medan yang berbasis sektor jasa,perdagangan dan restoran juga dipengaruhi oleh pola perkembangan Kota Medan yang ditandai oleh meningkatnya pusat-pusat perdagangan yang berskala besar, bangunan hotel-hotel dan restoran, serta transportasi dan telekomunikasi.

Tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun mendatang antara lain adalah :

- 1) Perlu pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) dengan meningkatkan akses permodalan, jaminan usaha, pengembangan manajemen usaha, penyediaan tempat usaha dan pemasaran; serta peningkatan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran.
- 2) Perlu peningkatan kerjasama dan kemitraan antara UMKMK dengan usaha besar.

- 3) Perlu pengembangan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat menampung tambahan angkatan kerja berusia muda.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Kota Medan sangat di pengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional dan global. Kinerja perekonomian kota relatif cukup baik. Sesuai dengan RPJM Kota Medan tahun 2011-2015, Pemerintah Kota Medan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang progresif, dinamis dan berkelanjutan dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong investasi daerah, dan meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah. Melalui berbagai langkah tersebut, perekonomian Kota Medan tumbuh rata-rata di atas 8,28 persen pertahun.

Kota Medan juga merupakan penyumbang terbesar pembentukan PDRB di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sekitar 30,49 persen pada tahun 2008. Disamping itu Kota Medan merupakan barometer perekonomian daerah, yang menyediakan sumber daya manusia lebih unggul dan prasarana social ekonomi yang lebih baik di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa potensi unggulan layak dikembangkan, untuk mendukung kinerja pembangunan kota dengan melihat potensi pendukung bidang usaha potensial yang ada, sehingga dapat meningkatkan pembangunan kota dan dapat berimbas ke Kabupaten/Kota sekitarnya seperti bidang usaha perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan.

Jumlah lembaga keuangan mikro di Kota Medan sebanyak 207 unit yang terdiri dari: (1) usaha simpan pinjam (USP) sebanyak 178 unit,(2) koperasi simpan pinjam (KSP) 4 unit, dan (3) BMT sebanyak 25 unit.

Dari industri kecil, terdapat sepuluh produk yang dijadikan sebagai produk andalan Kota Medan jika dilihat dari aspek pasar. Komoditi unggulan ini termasuk produk konsumsi sederhana, misalnya perabot rumah tangga dari kayu, anyaman rotan, alas kaki dan barang hasil konveksi. Adapun komoditi unggulan dari industri kecil makanan misalnya kopi olahan, sirup markisa, bika ambon dan kerupuk ubi. Salah satu produk makanan ini, bika ambon telah menjadi buah tangan yang khas untuk dibawa bagi yang berkunjung ke Kota Medan.

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia, maka seperti kota besar pada umumnya, Medan memiliki kawasan industri. Saat ini terdapat dua kawasan industri di Medan yaitu Kawasan Industri Medan (KIM) 1 dan KIM 2 yang berlokasi dekat Pelabuhan Belawan. KIM memiliki lahan 514 Ha dan menyediakan fasilitas listrik 120 MW. Saat ini terdapat 86 perusahaan swasta nasional yang menempati lokasi tersebut berdampingan dengan 17 perusahaan asing, sehingga Kota Medan dinilai sebagai kota yang relatif aman untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk mengantisipasi perkembangan industri dan kebutuhan lokasi berusaha yang lebih besar, Kota Medan telah menyediakan Kawasan Industri Baru (KIB), yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan dengan lahan yang disediakan 650 Ha, dan masih bisa dikembangkan menjadi 1.000 Ha. Pada proses selanjutnya KIB ini kemudian akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dengan total luas wilayah perencanaan beradadi atas lahan seluas \pm 2.000 Ha dan telah ditetapkan melalui SK Walikota Medan Nomor 640/623.K/2008 tanggal 22 Juli 2008 serta telah dilakukan kajian studi

kelayakan dan master plannya pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu Pemerintah Kota Medan juga menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil yakni Perkampungan Industri Kecil (PIK) yang terletak di Kecamatan Medan Denai.

Di luar potensi bisnisnya, Kota Medan sangatlah layak menjadi tujuan wisata. Selain untuk mengunjungi lokasi seperti Danau Toba atau Berastagi yang sejuk, Kota Medan sendiri sarat dengan objek wisata. Tujuan wisata di Kota Medan diantaranya adalah Taman Buaya di kawasan Sunggal, berisikan 3000 ekor buaya aneka jenis. Wisata yang paling menarik di Kota Medan adalah bangunan tua yang dibangun dari pertengahan abad XX di Medan. Sebagian besar bangunan tersebut masih ada, indah dan memberi gambaran utuh pada Kota Medan masa lalu. Wisata kuliner merupakan jenis wisata yang melengkapi kepariwisataan Kota Medan.

Fasilitas pergudangan pelabuhan, bisnis pergudangan sangat erat kaitannya dengan perkembangan industri, ekspor dan impor. Dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, diperkirakan arus ekspor dan impor akan semakin meningkat, berdampak pada peningkatan bisnis pergudangan.

Permintaan atas bangunan yang berupa gudang, juga semakin meningkat sebagai dampak deregulasi di sektor industri manufaktur serta perdagangan internasional. Sebagai tindak lanjut adanya peraturan dalam rangka mengatur tata ruang kota maka pergudangan umum yang terletak di daerah kota cenderung harus di relokasi, sementara itu permintaan akan ruangan gudang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

masih ada pangsa pasar untuk bisnis pergudangan di Kota Medan, namun pertumbuhannya harus dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan digerakkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai dari ekspor impor. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan Tahun mengalami peningkatan dari Tahun 2009 sebesar 6,55 %, Tahun 2010 sebesar 7,15 % dan Tahun 2011 sebesar 7,69 %.

d. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita mencerminkan tingkat produktivitas daerah dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah. Rata-rata PDRB perkapita selama tahun 2009-2011 adalah sebesar Rp. 83,18 juta berdasarkan harga berlaku dan sebesar Rp.35,94 juta berdasarkan harga konstan. PDRB perkapita Kota Medan atas dasar harga berlaku juga meningkat dari Rp 72,63 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.93,61 juta pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 29 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Medan.

B. Hasil Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka dan numeric.

1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang penulis peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Data diambil dimulai pada tahun 2012-2016. Yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi dan Belanja Langsung. Yang kemudian di olah menggunakan program SPSS 16,0.

Tabel IV.1
Data Pajak dan Retribusi dan Belanja Langsung
Pemerintah Kota Medan

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Belanja Langsung |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2012 | 892.674.245.233,74 | 127.839.652.517,53 | 1.494.850.608.278,49 |
| 2013 | 881.346.719.012,01 | 188.459.795.126,50 | 1.602.498.127.952,33 |
| 2014 | 962.728.267.172,53 | 171.006.302.216,00 | 2.021.590.110.051,46 |
| 2015 | 996.019.808.900,64 | 200.156.478.829,00 | 2.412.430.321.399,63 |
| 2016 | 1.125.638.762.947,32 | 115.584.400.046,00 | 2.550.662.984.955,65 |

Sumber : Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah menunjukkan tren kenaikan kecuali pada tahun 2013 Pajak Daerah mengalami penurunan, Retribusi Kota Medan menunjukkan tren fluktuatif untuk setiap tahunnya, pada tahun 2013 mengalami kenaikan, untuk tahun 2014 retribusi daerah mengalami penurunan, tahun 2015 retribusi daerah mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 retribusi daerah mengalami penurunan. Sedangkan untuk Belanja Langsung Kota Medan menunjukkan tren kenaikan.

2. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

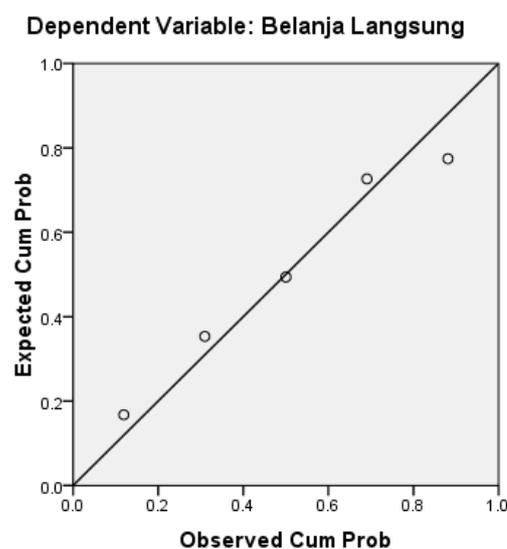
Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik.

Kriteria pengujian :

1. Data berdistribusi normal apabila data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
2. Data tidak berdistribusi normal apabila data tersebut menceng ke kiri atau ke kanan.

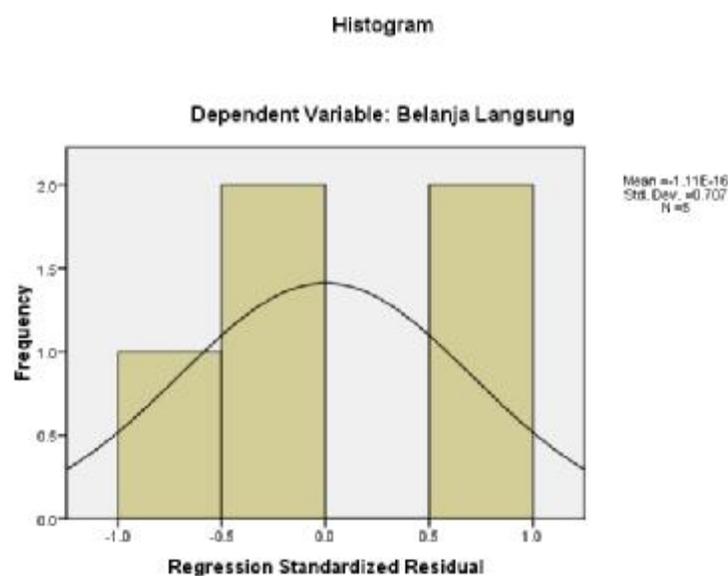
Gambar IV.1
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan kriteria pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan normal karena terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Gambar IV.2
Uji Normalitas



2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah munculnya peluang diantara beberapa variabel bebas unuk saling berkolerasi, pada praktiknya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Mengukur multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena $VIF = 1/tolerance$. Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $1,000 > 0,1$ atau sama dengan $VIF 1,000 < 10$.

Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel IV.2
Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Pajak Daerah | .833 | 1.200 |
| Retribusi Daerah | .833 | 1.200 |

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Berdasarkan tabel 4.2 Uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).
2. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka hasil estimasi akan biasa.

Nilai Tolerance $0,833 > 0,1$

Nilai VIF (Variance Inflation Factor) $1,200 < 10$

Kedua variabel independen yakni Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

3) Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data

time series. Cara yang dapat digunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Tabel IV.3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | .991 ^a | .981 | .963 | 90947.06 | .981 | 52.536 | 2 | 2 | .019 | 2.608 |

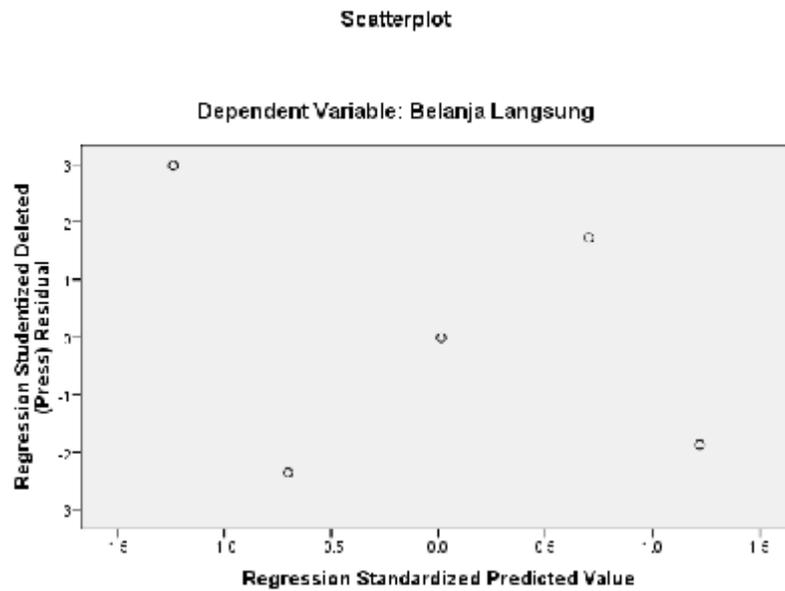
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Langsung

Berdasarkan data diatas, diperoleh D-W sebesar 2,608. Angka ini terletak diantara -2 dan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negatife.

4) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar IV.3 Heterokedastisitas

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak,tidak membentuk pola yang jelas atau teratur,serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

3. Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui keeratan pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Belanja langsung, maka dapat dignakan regresi linear berganda dapat dilihat dari nilai koefisien B pada tabel berikut:

Tabel IV.4: Regresi Linear Berganda**Coefficientsa**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 13.837 | 612959.832 | |
| Pajak Daerah | .582 | .506 | 1.084 |
| Retribusi Daerah | .593 | 1.337 | .403 |

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber : data diolah melalui SPSS

Persamaan model regresi yang digunakan adalah $Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, dari data diatas maka persamaan model regresinya adalah :

$$Y = 13,837 + 0,582 X_1 + 0,593 X_2$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa pajak daerah (X_1) memiliki koefisien β_1 . Variabel X_2 mempunyai koefisien β_2 yang positif. Artinya variabel x_2 mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y . Variabel X_2 memiliki kontribusi relatif yang paling besar di antara variabel bebas.

Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) adalah 13.837 yang artinya jika pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja langsung bernilai nol (H_0), maka Belanja langsung bernilai 13.837.
2. Nilai koefisien regresi berganda variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,582 yang artinya setiap peningkatan pajak daerah sebesar 100% akan

meningkatkan Belanja langsung sebesar 58,2% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

3. Nilai koefisien regresi berganda variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,593 yang artinya, setiap retribusi daerah ditingkatkan sebesar 100% akan meningkatkan Belanja langsung sebesar 59,3 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Bila sig lebih besar 0.05 maka H_0 = diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat.
- 2) Bila sig lebih kecil 0,05 maka H_0 = ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat.

Tabel IV.5
Uji t
Coefficientsa

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 13.837 | 612959.832 | | 6.260 | .025 |
| Pajak Daerah | .582 | .506 | 1.084 | 10.242 | .009 |
| Retribusi Daerah | .593 | 1.337 | .403 | 3.808 | .043 |

Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber : Data Penelitian (diolah), 2018

a) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja langsung

Dari hasil penelitian ini di peroleh nilai $t_{hitung} 10,242 > t_{tabel} 3,182$ dengan probabilitas $Sig 0,009 < \alpha 0,05$. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah (X_1), secara parsial

mempunyai pengaruh terhadap Belanja langsung (Y). Diterima kesimpulannya: ada pengaruh Pajak daerah terhadap Belanja langsung dalam meningkatkan retribusi pajak pada Pemerintah Kota Medan.

b) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai $t_{hitung} 3,808 > t_{tabel} 3,182$ dengan probabilitas $Sig\ 0,043 < \alpha\ 0,05$. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah (X_2), secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Belanja langsung. Diterima kesimpulannya: ada pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung dalam meningkatkan pendapatan pajak pada Pemerintah Kota Medan.

b. Uji F (Simultan)

Hasil pengujian akan dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ketentuannya, jika nilai probabilitas (sig) pada tabel Anova $< \alpha\ 0,005$. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.6: Uji F
ANOVA^b**

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 8.691E11 | 2 | 4.345E11 | 52.536 | .019 ^a |
| | Residual | 1.654E10 | 2 | 8.271E9 | | |
| | Total | 8.856E11 | 4 | | | |

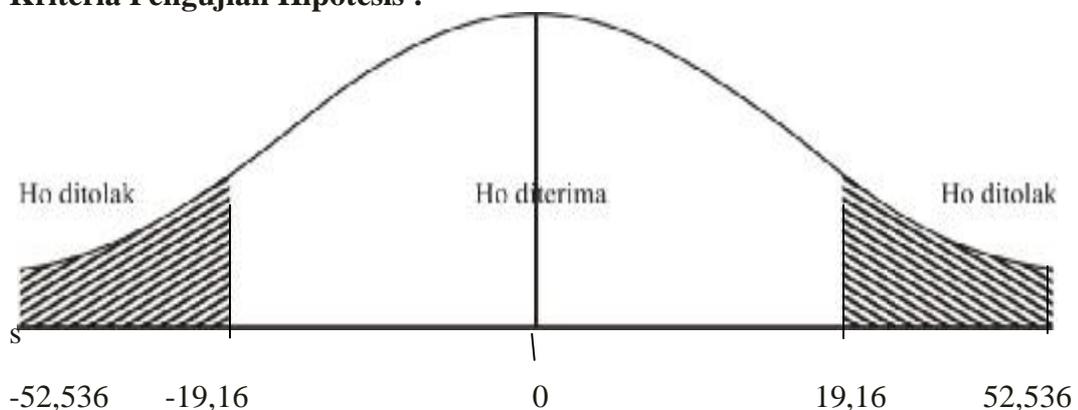
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber : Data Penelitian (diolah), 2018

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai $F_{hitung} 52,536 > F_{tabel} 19,16$ dengan probabilitas sig $0,019 < \alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima, disimpulkan bahwa Pajak daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan.

Kriteria Pengujian Hipotesis :



Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar IV.7 : Kriteria Pengujian Hipotesis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung

5. Koefisien Determinasi

Tabel IV.7 . Koefesien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .991 ^a | .981 | .963 | 90947.06 |

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Berdasarkan nilai koefisien determinasi pada tabel diatas dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R sebesar 0,991.

Menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan Pajak daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) dengan Belanja langsung mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Tingkat hubungan yang kuat ini dapat dilihat dari tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien determinasi:

Tabel IV.18
Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi

| Interval Koefisien | Tingkat hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,000-0,199 | Sangat rendah |
| 0,200-0,399 | Rendah |
| 0,400-0,599 | Sedang |
| 0,600-0,799 | Kuat |
| 0,800-1,000 | Sangat kuat |

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai R Square 0,981 atau 98,1%, interpretasinya adalah kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan sebesar 98,1% dan sisanya 1,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Setelah penulis mendapatkan data penelitian dari responden dan mendapatkan hasil pengolahan dari data SPSS hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kondisi penelitian responden terhadap variabel-variabel penelitian ini secara umum sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya responden yang menyatakan setuju terhadap kondisi masing-masing variabel penelitian. Penjelasan dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak daerah terhadap Belanja langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung Pemerintahan Kota Medan, hal ini dapat dilihat tingkat signifikan $0,009 < 0,005$ yang menunjukkan variabel pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja langsung Pemerintahan Kota Medan, yang berarti bahwa semakin besar jumlah pajak daerah maka jumlah belanja langsung juga semakin besar.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Panggabean (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan faktor yang paling dominan mempengaruhi belanja daerah berturut-turut adalah pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. Dan hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Syahputra (2010) yang menyatakan Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh positif secara silmutan dan parsial terhadap belanja daerah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan DBH dan DAU.

Mardiasmo dkk, (2002) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keeluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengefektifkan perda-perda yang mengatur tentang pajak daerah dan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara melakukan identifikasi sumber pendapatan untuk mencari peluang-peluang penerimaan pajak daerah. Dan adanya berbagai macam perubahan undang-undang, khususnya mengenai perpajakan, perlu ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan suatu strategi agar dapat memberikan hasil yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis secara maksimal.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja langsung Pemerintahan Kota Medan, hal ini dilihat tingkat signifikan sebesar $0,043 < 0,005$ yang menunjukkan variabel retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja langsung Pemerintahan Kota Medan, yang berarti bahwa semakin besar jumlah retribusi daerah maka jumlah belanja langsung juga semakin besar.

Retribusi daerah untuk seluruh Pemerintahan Kota Medan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi penurunan cukup signifikan pada beberapa Pemerintahan Kota Medan tetapi adapun yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Hasil ini menunjukkan untuk pendapatan asli daerah kontribusi terbesar disumbangkan oleh retribusi daerah, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah objek retribusi daerah lebih banyak dari pajak daerah, sehingga potensi penerimaannya lebih besar, selain itu kesadaran masyarakat pengguna jasa pelayanan dalam melakukan pembayaran. Serta

menandakan bahwa pengelolaannya menuju kearah yang lebih baik, hal ini juga mengindikasikan adanya upaya yang keras dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, menurut Panggabean, (2009) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintah daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengefektifkan perda-perda yang mengatur tentang retribusi dan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara melakukan identifikasi sumber pendapatan untuk mencari peluang-peluang penerimaan retribusi yang baru dan menghitung potensi pendapatan riil yang dimiliki oleh daerah dengan metode perhitungan yang sistematika dan rasional.

3. Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja langsung

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai $F_{hitung} 52,536 > F_{tabel} 19,16$ dengan probabilitas $sig 0,019 < \alpha = 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima, disimpulkan bahwa Pajak daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan analisis hasil uji regresi diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah membiayai belanja langsung pada Pemerintah kota Medan, hal ini bermakna bahwa hipotesis yang diuraikan sebelumnya sejalan dengan hasil penelitian ini.

Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Panggabean (2009) yang menyatakan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sudah tentu pendapatan daerah akan meningkat yang pada akhirnya juga diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang akan berdampak pada kemakmuran rakyat. Hasil penelitian yang dilakukan Panggabean, (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja langsung Pemerintah Kota Medan.
2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan
3. Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja langsung pada Pemerintah Kota Medan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada perusahaan :

1. Alokasi belanja langsung dapat terus ditingkatkan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan cara optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menambah jumlah variabel yang mempengaruhi belanja daerah tidak hanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Anggraenin Evyta Sari, 2010. *Pengendalian Diri, Motivasi, Dan Minat Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur.
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Bastian, I. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada
- Prakosa, Kesit bambang, 2004, "Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah". Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sidik. M. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Natura Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Sugiono, (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono, (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang belanja daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah